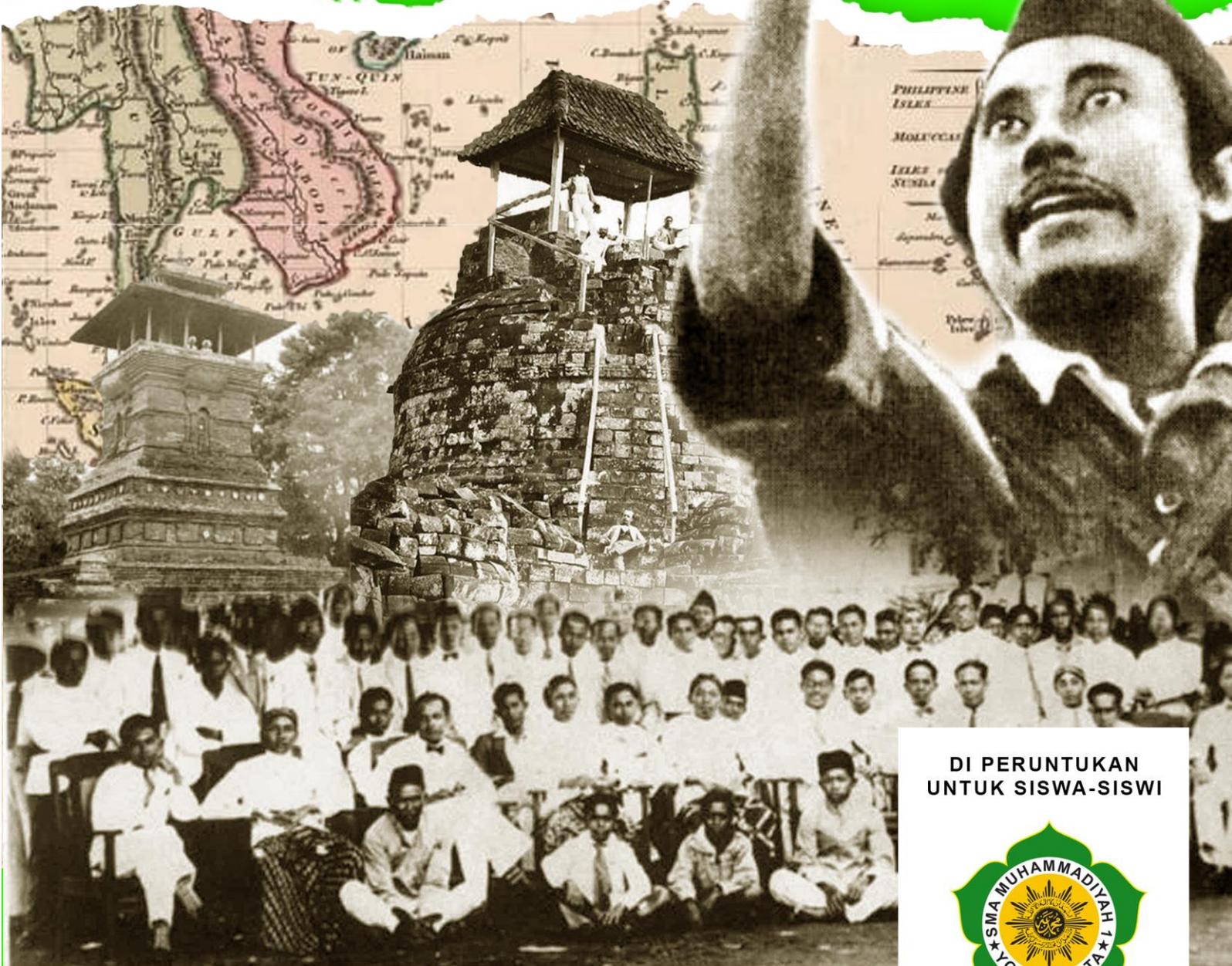


MODUL

SEJARAH INDONESIA

WAJIB

KELAS XII TAHUN 2020



DI PERUNTUKAN
UNTUK SISWA-SISWI

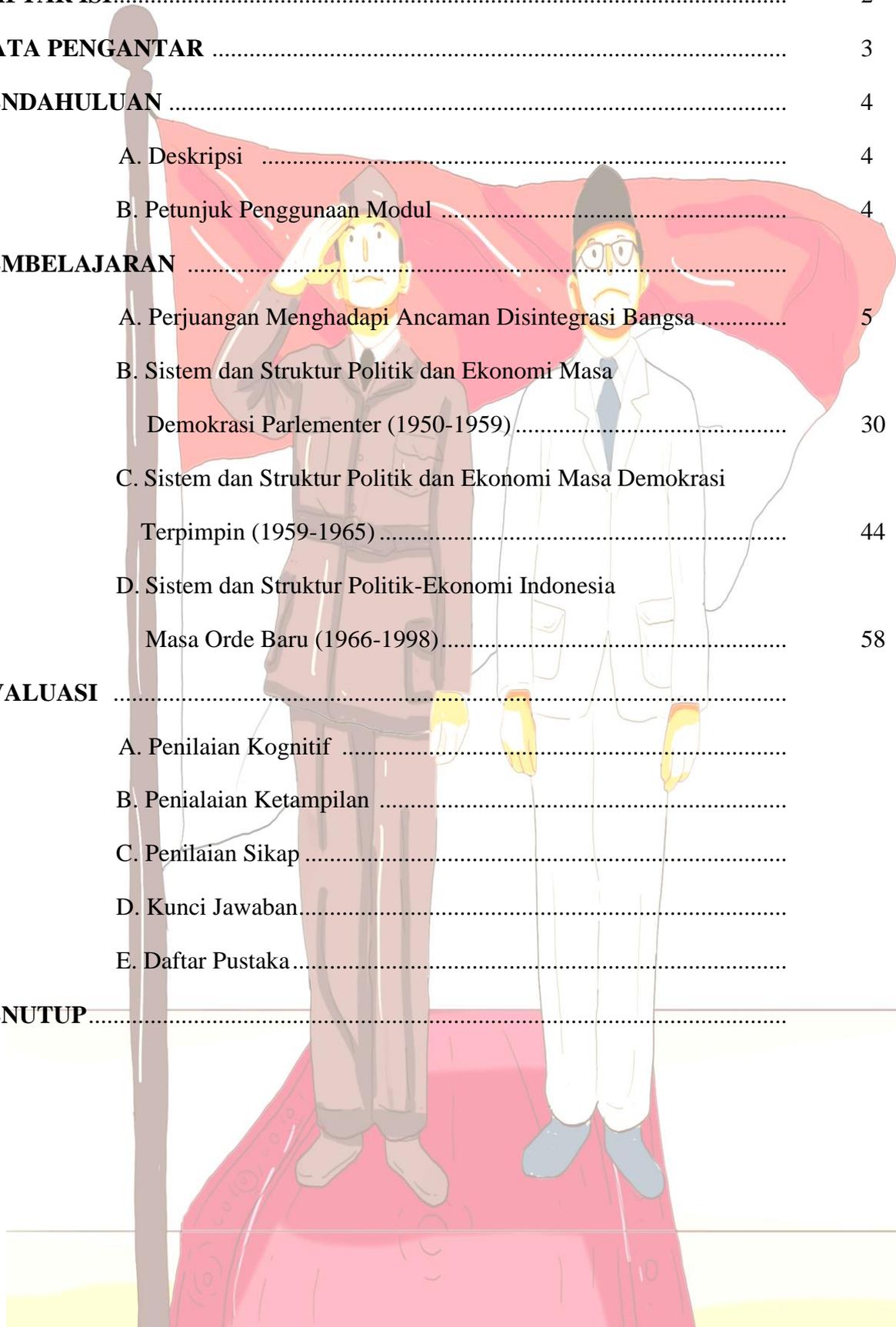


Disusun oleh: Aji Digdaya, S.Pd

SMA MUHAMMADIYAH
1 YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
PENDAHULUAN	4
A. Deskripsi	4
B. Petunjuk Penggunaan Modul	4
PEMBELAJARAN	
A. Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa	5
B. Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959).....	30
C. Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)	44
D. Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998).....	58
EVALUASI	
A. Penilaian Kognitif	
B. Penilaian Ketampilan	
C. Penilaian Sikap	
D. Kunci Jawaban.....	
E. Daftar Pustaka.....	
PENUTUP	



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmatNya penyusunan Modul Pembelajaran Sejarah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Kelas XII MIPA-IPS Semester 1 SMA dapat diselesaikan.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memberikan materi tambahan kepada ananda semua ditengah situasi adanya Covid-19, diharapkan dengan adanya modul ini peserta didik dapat dengan mudah memahami dalam mempelajari sejarah.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, terutama kepada SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang memberikan berbagai macam fasilitas pembuatan modul dan juga Ibu kepala sekolah Fitrisari Sukmawati, M.Pd yang selalu memotivasi kami semua terutama MGMP sejarah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan Ibu Diana Trisnawati, M.Pd selaku pembimbing kami.

Semoga dengan adanya modul ini ananda bisa mendapatkan wawasan yang lebih tentang sejarah dan berguna untuk masa sekarang dan masa depan yang akhirnya memperoleh masa-masa depan yang lebih baik.

Wa'alaikumsalam wr wb

Penyusun

Guru Sejarah Indonesia
Aji Digdaya, S.Pd

PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul ini merupakan pengembangan dari buku wajib kelas XII kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Sesuai dengan kebijakan sekolah, bahwa modul ini disusun dalam rangka memudahkan para siswa untuk belajar, terutama di masa pandemic Covid-19 saat ini. Modul Sejarah Indonesia kelas XII ini terdiri dari beberapa materi, antara lain: (1) Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa, (2) Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), (3) Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), (4) Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998). Seluruh materi dari bahasan tersebut akan diuraikan secara jelas, mendalam, dan lebih menarik. Oleh karena itu, marilah kita pelajari dan ikuti seluruh instruksinya... Jangan lupa untuk mengerjakan bagian Latihan dan Tes Formatif yaaa 😊.

B. Petunjuk Penggunaan Modul

Bacalah dengan seksama penggunaan modul ini :

1. Berdoalah sebelum mengerjakan maupun mempelajari modul ini
2. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang akan diperoleh setelah mempelajari materi ini
3. Modul ini memuat informasi tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran
4. Materi modul dari pergolakan di dalam negeri sampai Masa Orde Baru
5. Terdapat latihan soal disetiap mater.
6. Pelajari dengan seksama materi pembelajaran, jika ada informasi yang kurang jelas atau mengalami kesulitan dalam mempelajari materi pembelajaran, sebaiknya berkonsultasi pada pengajar bisa melalui nomor WA.
7. Kerjakan evaluasi yang terdapat pada akhir uraian materi pembelajaran.
8. Akhirilah dengan bacaan “Alhamdulillah” ketika ananda sudah menyelesaikan ataupun sukses mengerjakan soal dalam modul ini.



Pembelajaran

**Bab
1**

**Perjuangan
Menghadapi
Ancaman
Disintegrasi Bangsa**

KI

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KD

- 3.1.2 Menganalisis tentang Pemberontakan PKI Madiun 1948
- 3.1.3 Menjelaskan tentang DI/TII, G30S/PKI, Andi Aziz, RMS, APRA, Permesta
- 3.1.4 Mengevaluasi peran tokoh-tokoh perjuangan nasional dalam mempertahankan kemerdekaan 1945-1965
- 3.1.5 Menuliskan peran tokoh-tokoh perjuangan nasional dalam mempertahankan kemerdekaan 1945-1965

Perhatikan Peta Konsep ini Gaees..



A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948

1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Banten dan Silungkang tahun 1926-1927 merupakan pemberontakan pertama kaum perintis kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan ini sangat besar artinya bagi sejarah Indonesia modern. Dalam peristiwa itu, kaum komunis dan agamis bekerja sama memukul Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Inilah untuk pertama dan terakhir kalinya PKI menjalin kerja sama dengan kaum agama.

2. Latar Belakang Munculnya Pemberontakan PKI Madiun 1948

- a. Pemberontakan PKI di Madiun meletus pada 18 September 1948, berpusat di wilayah sekitar Madiun, Jawa Timur. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah.



- b. Aksi ini merupakan reaksi terhadap hasil Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasanya banyak

wilayah oleh Belanda. Selain itu, PKI juga menolak rasionalisasi jumlah prajurit TNI, karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI. Akibat perjanjian ini kelompok kiri yang menentang perjanjian Renville dan Nasionalisasi Tni membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin.

- c. Para pemberontak merebut kendali atas kota Madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintah Indonesia. Mereka kemudian mendirikan Pemerintah Front National Daerah Madiun. Salah satu korban pemberontakan PKI di Madiun ini adalah Gubernur Jawa Timur, RM Suryo dan dokter pejuang kemerdekaan, dr, Mawardi. Pemerintah Indonesia mengatasi pemberontakan PKI di Madiun dengan mengerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin Jenderal Abdul haris Nasution dan Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer.
- d. Puncak gerakan yang dilakukan PKI pada tanggal 18 september 1948 yaitu dengan pernyataan tokoh-tokoh PKI tentang berdirinya Sovyet Republik Indonesia yang bertujuan mengganti dasar negara pancasila dengan Komunis. Yang menarik adalah ketika Sovyet Republik Indonesia diproklamirkan Amir Syarifuddin dan Muso yang selanjutnya di usung sebagai presiden dan wakil presiden malah berada di luar Madiun. Kesatuan-kesatuan yang telah dipersiapkan untuk melakukan pemberontakan tersebut antara lain: kesatuan yang dipimpin oleh Sumartono (Pesindo). Pasukan Divisi VI Jawa Timur dibawah pimpinan Kolonel Djokosujono dan Letkol Dahlan yang waktu Panglima Divisinya ialah Kolonel Sungkono. Juga dari sebagian Divisi Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Suadi dan Letkol Sujoto. Dalam gerakan ini kesatuan PKI telah melakukan pembunuhan terhadap dua orang pegawai pemerintah dan menangkap empat orang militer.

3. Akhir dari Konflik yang terjadi di Madiun pada tahun 1948

Pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tegas. Presiden Soekarno kemudian memusatkan seluruh kekuasaan negara berada ditangannya serta berpidato di radio untuk menyuruh rakyat memilih Soekarno - Hatta atau Musso dengan PKI-nya. Setelah mendengar pidato Soekarno tersebut rakyat pun meresponya dengan memilih mendukung Soekarno daripada Muso. Mengetahui respon rakyat Indonesia tersebut pemerintah segera melancarkan operasi penumpasan pada gerombolan tersebut.

Pertama-tama pemerintah mengadakan Sidang Kabinet Lengkap pada tanggal 19 September 1948 yang diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri dengan mengambil keputusan antara lain ;

✓

- ✓ Peristiwa Madiun yang digerakan oleh FDR/PKI adalah suatu pemberontakan terhadap Pemerintah dan mengadakan instruksi kepada alat-alat Negara dan Angkatan Perang untuk memulihkan keamanan Negara.
- ✓ Memberikan kuasa penuh kepada Jendral Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan dan ketertiban kepada keadaan biasa di Madiun dan daerah-daerah lainnya.

Setelah presiden memberi perintah kepada Angkatan Perang untuk segera mengembalikan keamanan dengan segera diadakan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara dan diadakan penggerebagan tempat-tempat yang dianggap perlu. Supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik, Markas Besar Angkatan Perang segera menetapkan dan mengangkat Kolonel Sungkono Panglima Divisi VI Jawa Timur sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur yang mendapat tugas menggerakkan pasukan dari arah timur. Karesidenan Madiun untuk menumpas Pemberontakan PKI dan mengamankan kembali seluruh Jawa Timur dari anasir pemberontak. Setelah mendapat perintah tersebut Kolonel Sungkono segera memerintahkan Brigade Surachmad bergerak menuju Madiun. Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Jonosewojo yang terdiri atas Batalyon Sabirin Muchtar bergerak menuju Trenggalek terus ke Ponorogo, Batalyon Gabungan Pimpinan Mayor Sabaruddin bergerak melalui Sawahan menuju Dungus dan Madiun, Batalyon Sunarjadi bergerak melalui Tawangmangu, Sarangan, Plaosan bergerak Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sadikin.

Untuk tugas operasi ini Divisi Siliwangi mengerahkan kekuatan 8 Batalyon, yaitu : Batalyon Achmad Wiranatakusumah, Batalyon Lukas yang menggantikan Batalyon Umar, Batalyon Daeng, Batalyon Nasuhi, Batalyon Kusno Utomo, Letkol Kusno Utomo memegang dua batalyon dan menjabat sebagai Kepala Staf Brigade, Batalyon Sambas, yang kemudian diganti oleh Batalyon Darsono, Batalyon A. Kosasih, Batalyon Kemal Idris. Di samping itu juga Pasukan Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Slamet Ryadi, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi dan Pasukanpasukan dari Banyumas yang dipimpin oleh Mayor Surono. Batalyon Kemal Idris dan Batalyon A. Kosasih yang didatangkan dari Yogyakarta bergerak ke Utara dengan tujuan Pati. Batalyon Daeng bergerak ke Utara dengan tujuan Cepu, Blora, Batalyon Nasuhi dan Batalyon Achmad Wiranatakusumah bergerak ke Selatan dengan tujuan Wonogiri dan Pacitan. Batalyon Darsono dan Batalyon Lukas bergerak ke Madiun. Sedangkan Pasukan Panembahan Senopati bergerak ke Utara, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi bergerak ke Timur menuju Madiun melalui Sarangan.



Musso yang melarikan diri ke daerah Ponorogo tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948 oleh Brigade S yang dipimpin oleh Kapten Sunandar sewaktu melakukan patroli. Sedangkan Pada tanggal 20 Nopember 1948 pasukan Amir menuju Tambakromo, sebelah Timur Kayen sebelah Selatan Pati. Mereka terdiri dari kurang lebih 500 orang, ada yang beserta keluarga mereka.

Keadaan mereka sangat menyedihkan. Banyak diantara mereka yang ingin melarikan diri, tetapi rakyat selalu siap menangkap mereka. Banyak mayat pemberontak diketemukan karena sakit, atau kelaparan. akhirnya Amir menyerahkan diri beserta pasukannya pada tanggal 29 Nopember, saat mereka menyeberangi Sungai Lusi menuju ke desa Klambu, antara Klampok dan Bringin (7 Km dari Purwodadi).

Pasukan TNI mengadakan taktik menggiring ke titik buntu yang mematikan. Taktik ini ternyata berhasil, karena pasukan pemberontak terjepit di daerah rawa-rawa. Mereka dikepung oleh kesatuan-kesatuan TNI, akhirnya Amir menyerahkan diri beserta pasukannya.

Gerakan Operasi Militer yang dialncarkan oleh pasukan yang setia pada pemerintah RI berjalan dengan singkat. Dalam 12 hari Madiun dapat dikuasai kembali, teaptnya tanggal 30 September 1948 jam 16.15. Setelah Madiun dapat direbut kembali oleh pasukan-pasukan TNI, maka jam 17.30 sore keamanan telah terjamin kembali, dan tiap-tiap rumah telah berkibar bendera Merah Putih.

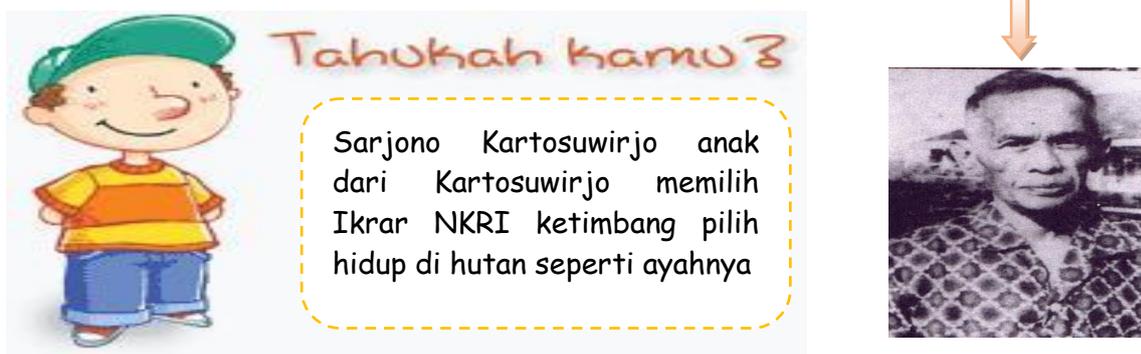
**Muso****Amir Syarifuddin**

Analisislah pengaruh pemikiran kedua tokoh diatas dalam situasi pemerintahan Indonesia ?

Jawab:

B. Pemberontakan Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) didirikan 7 Agustus 1949. Tujuan didirikan untuk membentuk negara Islam, akar sejarahnya telah ada sejak zaman Jepang, pada saat datang keinginan untuk menciptakan negara berdasarkan Islam. Dewan Imamah (Penasihat) DI/TII adalah Soekarmadji Maridjan Kartosuwirjo.



Rongrongan atas keamanan dalam negeri dilakukan oleh DI/TII dalam mewujudkan misinya untuk mendirikan negara Islam. Oleh sebab itu, terjadilah beberapa pemberontakan di berbagai daerah antara lain:

1. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Gerakan DI/TII di Jawa Barat tampak pada waktu terjadi penarikan pasukan TNI dari wilayah yang diduduki Belanda ke wilayah RI sebagai akibat perundingan Renville. Akan tetapi, anggota Hizbullah dan Sabilillah (tentara dari DI/TII) tidak mengikuti ketentuan perundingan Renville. kedua laskar itu berada di bawah pengaruh Soekarmadji Maridjan Kartosuwirjo.

Semula Kartosuwirjo ikut bergerilya di daerah Jawa Barat. Ia ingin membentuk negara Islam lepas dari Republik Indonesia. Untuk itu ia menghimpun orang-orang yang setia kepadanya untuk masuk tentara Darul Islam. Pada tanggal 4 Agustus 1949 Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Tindakan Kartosuwirjo itu membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Rakyat pun sangat dirugikan karena Kartosuwirjo dan anggotanya melakukan teror, pembunuhan, pengrusakan, dan pengambilan harta kekayaan masyarakat secara paksa.

Penumpasan Gerakan DI/TII di Jawa Barat memakan waktu yang lama. Baru pada tahun 1960-an, Divisi Siliwangi mulai melancarkan operasi secara

terstruktur dan besar-besaran. Dengan dibantu rakyat dalam operasi "Pagar Betis" yaitu mengepung basis-basis dari DI/TII, pada saat tahun 1962 gerombolan DI/TII akhirnya bisa dihancurkan. Kartosuwirjo dapat ditangkap di Gunung Geber, ia kemudian di hukum mati.

2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Perjuangan DI/TII memperoleh dukungan dari Jawa Tengah. Tokoh utamanya adalah Amir Fatah. Ia sebelumnya adalah pejuang dan komandan laskar Hizbullah. Selanjutnya ia berhasil mempengaruhi laskar Hizbullah yang ingin bergabung dengan TNI di Tegal.

Amir Fatah kemudian memproklamasikan diri dan bergabung dengan DI/TII Kartosuwirjo tanggal 23 Agustus 1949. Mereka membentuk pemerintah tandingan di daerahnya. Gerakan yang sama juga ada di Kebumen. Pemimpinnya adalah Mohammad Mahfu'dh Abdulrachman atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Sumolangu. Gerakannya juga merupakan penerus DI/TII Kartosuwirjo dengan markas di Brebes dan Tegal. Pembelotan ini merupakan pukulan bagi TNI saat itu.

Pemerintah lalu membentuk pasukan Benteng Raiders untuk menghadapi gerakan tersebut. Dengan pasukan ini, pemerintah menggelar operasi Gerakan Banteng Negara. Sisa-sisa gerakan DI/TII di Jawa Tengah kemudian berhasil dikalahkan oleh pemerintah melalui Operasi Guntur. Pada mulanya gerakan DI/TII di Jawa Tengah sudah mulai terdesak oleh TNI. Namun, pada bulan Desember 1951 mereka menjadi kuat kembali karena mendapat pertolongan dari Batalyon 426. Batalyon 426 di daerah Kudus dan Magelang memberontak dan menggabungkan diri menjadi DI/TII. Kekuatan Batalyon pemberontak ini dapat dihancurkan. Sisa-sisanya lari ke Jawa Barat bergabung dengan DI/TII Kartosuwirjo.

Sementara itu, di daerah Merapi dan Merbabu terjadi kerusuhan oleh gerakan Merapi Merbabu Complex (MMC). Gerakan ini dapat dihancurkan TNI pada bulan April 1952. Sisa-sisanya bergabung dengan DI/TII. Kekuatan DI/TII di daerah Jawa Tengah yang semula dapat dipatahkan justru menjadi kuat lagi karena bergabungnya sisa-sisa Batalyon 426. Untuk mengatasi pemberontakan itu, segera dibentuk pasukan Banteng Raiders. Pasukan itu selanjutnya mengadakan operasi kilat yang dinamakan Gerakan Banteng Negara (GBN). Pada tahun 1954, gerakan DI/TII di Jawa Tengah dapat dikalahkan setelah pusat kekuatan gerakan DI/TII di perbatasan Pekalongan-Banyumas dihancurkan.



MMC merupakan orang-orang yang sakit hati dengan rasionalisasi yang terjadi di tubuh tentara. Dalam rasionalisasi tersebut, hanya tentara yang sudah dilatih oleh KNIL (Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda, dan PETA (Pembela Tanah Air) yang bisa masuk menjadi tentara negara. Sedangkan Tentara Rakyat yang lahir karena menjadi relawan tidak bisa menjadi tentara negara yang digaji oleh negara. "Mereka yang kecewa lantas mengasingkan diri ke lereng Merbabu dan Merapi."

3. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dikobarkan oleh Ibnu Hadjar, seorang mantan Letnan Dua TNI. Ia memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwirjo. Dengan pasukan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas, Ibnu Hadjar menyerang berbagai pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan aksi pengacauan pada bulan Oktober 1950. Pemerintah memberi kesempatan pada Ibnu Hadjar untuk menghentikan pemberontakannya secara damai. Ia pernah menyerahkan diri dengan pasukannya. Ia diterima kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Tetapi, ia melarikan diri dan melanjutkan pemberontakan. Pemerintah RI akhirnya mengambil tindakan tegas dan berani. Pada akhir tahun 1959, pasukan Ibnu Hadjar dapat dihancurkan. Ibnu Hadjar sendiri dapat ditangkap.

4. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kahar Muzakar adalah seorang pejuang kemerdekaan yang selama Perang Kemerdekaan ikut berjuang di Pulau Jawa. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kahar Muzaka berpulang ke Sulawesi Selatan. Ia berhasil menghimpun dan memimpin laskar-laskar gerilya di Sulawesi Selatan. Laskar-laskar itu tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS).



Gerakan DI/TII

Gambar: Euforia Pemuda DI/TII

Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirim surat untuk pemerintah dan pimpinan APRIS. Ia meminta agar semua anggota KGGS dimasukkan dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Permohonan itu ditolak karena hanya mereka yang lulus dalam penyaringan saja yang boleh diterima dalam APRIS. Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menyalurkan bekas gerilyawan ke dalam Korps Cadangan Nasional. Kahar Muzakar sendiri diberi pangkat Letnan Kolonel.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah tampaknya membawa hasil. Akan tetapi, pada saat akan dilantik, Kahar Muzakar bersama anak buahnya melarikan diri ke hutan dengan membawa berbagai peralatan yang diberikan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1951. Pada bulan Januari 1952, Kahar Muzakar menyatakan daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwirjo.

Pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dan mulai melancarkan operasi militer. Operasi penumpasan pemberontakan Kahar Muzakar memakan waktu yang lama. Pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar tewas dalam suatu penyerbuan. Bulan Juli 1965, Gerungan (orang kedua setelah Kahar Muzakar) dapat ditangkap. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

5. Pemberontakan DI/TII di Aceh

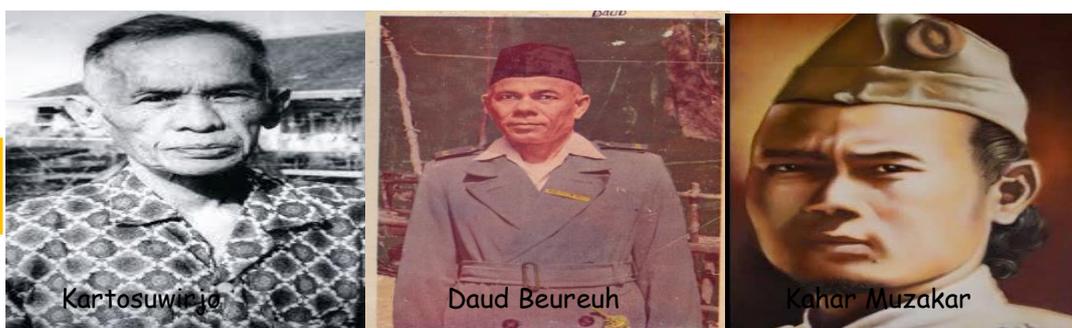
Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh. Pemberontakan pecah karena kekhawatiran akan kehilangan kedudukan dan

perasaan kecewa diturunkannya kedudukan Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah provinsi Sumatera Utara.

Semula Tengku Daud Beureueh adalah Gubernur Militer daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 1950 kedudukan Aceh diturunkan dari provinsi menjadi karesidenan, Daud Beureueh tidak senang karena jabatannya diturunkan. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Beureueh mengeluarkan maklumat yang mengatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah Kartosuwirjo. Setelah itu, Tengku Daud Beureueh mengadakan gerakan dan mempengaruhi masyarakat melalui propaganda bernada negatif terhadap pemerintah RI.

Untuk menghadapi gerakan itu, pemerintah mengirim pasukan yang memiliki persenjataan lengkap. Setelah beberapa tahun dikepung, baru pada tanggal 21 Desember 1962 tercapailah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Banyak dari gerombolan itu yang kembali ke pangkuan RI.

Dengan demikian, pemberontakan DI/TII di Aceh dapat diselesaikan dengan cara damai. Pemimpin dari gerakan ini pun setuju untuk kembali ke pangkuan RI. Parkarsa penyelesaian di Aceh tersebut dipimpin oleh Kolonel M. Jasin, Panglima Kodam I Iskandar Muda.



Perhatinan gaes gambar d atas.. analisislah peran 3 tokoh tersebut dalam pemberontakan

di daerahnya yaa.. 😊

Jawab yaa :

C. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung

Ratu Adil adalah mitologi yang sakral di dalam masyarakat Indonesia. Ratu Adil berasal dari ramalan Jayabaya, yaitu pemimpin yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan rakyat makmur sejahtera. Namun, bagaimana jika mitologi tersebut justru dijadikan sebagai salah satu propaganda politik, seperti yang dilakukan oleh Westerling beserta Angkatan Perang Ratu Adil nya (APRA). Dengan menggunakan embel-embel Ratu Adil, Westerling mencoba mencari simpati rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia.



Gambar: (a) Raymond Westerling dan Gambar (b) markas APRA, sekarang menjadi museum Mandalawangi

1. Latar Belakang Pemberontakan APRA

Di antara anggota pasukan Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) banyak yang tidak puas terhadap hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB). Ringkasnya mereka tidak suka dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada waktu itu bernama RIS.

Apalagi KNIL harus bergabung ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bagi TNI sebagai pejuang kemerdekaan yang setia tentu saja agak sulit menerima kehadiran KNIL, begitupula bagi KNIL sulit bergabung dengan TNI sebab mereka pernah berhadapan satu sama lain dalam pertempuran pada masa Perang Kemerdekaan.

Kecemburuan KNIL terhadap TNI semakin menjadi setelah diputuskan bahwa pimpinan APRIS harus berasal dari TNI. Hal ini diperparah dengan sambutan rakyat yang lebih simpatik terhadap keberadaan TNI. Pada titik

inilah, kaum reaksioner yang subversif memanfaatkan situasi untuk terus menyebar hasutan guna merongrong pemerintah Indonesia. Pada pertengahan November 1949, muncul seorang tokoh militer Belanda, Raymond Pierre Westerling, yang mulai menyusun kekuatan dengan menarik anggota KNIL yang didemobilisasikan.

Tujuan APRA dan kaum kolonialis yang ada di belakangnya adalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara tersendiri pada setiap negara-negara bagian RIS. Tujuan ini bertolak belakang dengan hasil Konferensi Antar-Indonesia di Yogyakarta yang telah menyetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional.

Pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada waktu itu melakukan penumpasan pada APRA dengan menggabungkan kesatuan kepolisian yang berada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Tentara Nasional Indonesia, Hal ini kemudian menyebabkan pada tanggal 24 Januari 1950 pada waktu itu dari Tentara Nasional Indonesia sendiri menumpaskan pemberontakan yang dilakukan APRA tersebut.



Naah sekarang.. coba bandingkanlah pemberontakan yang dilakukan Raymond Westerling dengan yang dilakukan Kartosuwiryo dengan DI/TII nya !

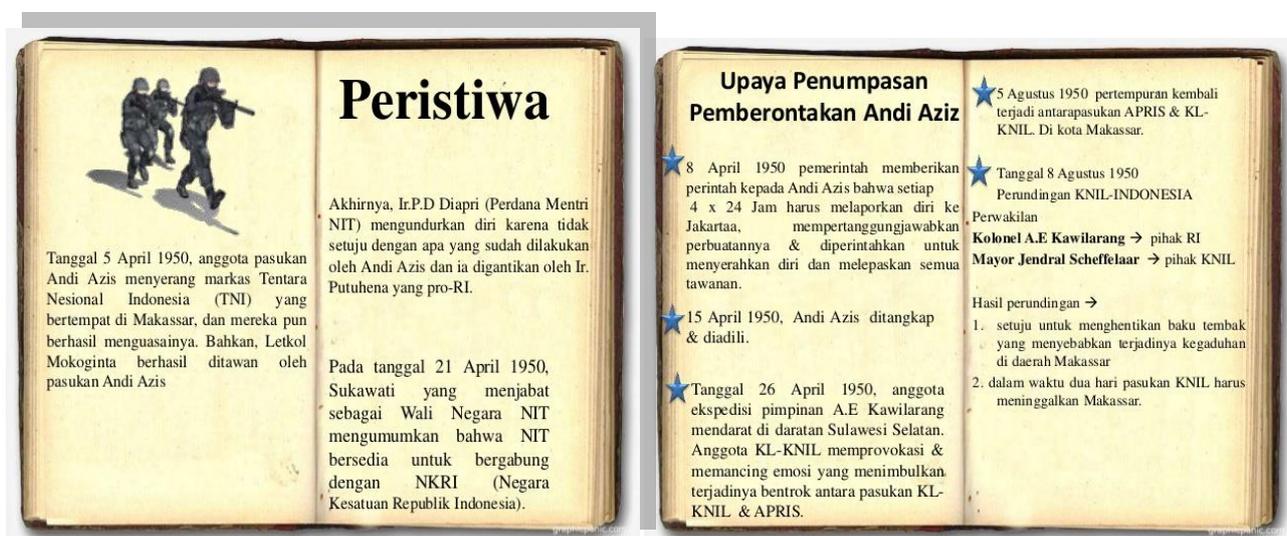
Jawaaab:

D. Pemberontakan Andi Aziz di Makasar

Pemberontakan Andi Azis terjadi di Makassar pada tahun 8 April 1950. Pemberontakan ini dilancarkan oleh para mantan serdadu dan perwira KNIL, yang menolak penggabungan dengan TNI dalam APRIS dan berusaha untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur.

Poin-poin penting peristiwa ini :

1. Berdasar kesepakatan Konferensi Meja Bundar, pasukan KNIL digabung kedalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) bersama pasukan TNI. Akibatnya, para serdadu KNIL menolak kesepakatan ini, dan merasa didominasi oleh para tentara TNI yang berasal dari Jawa. Akibatnya mereka menuntut agar KNIL diberi wewenang atas keamanan di Negara Indonesia Timur.
2. Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Azis, seorang mantan perwira KNIL. Kebanyakan pemberontak adalah mantan serdadu KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger, Pasukan Kolonial Hindia Belanda).
3. Tuntutan pasukan pemberontak Andi Azis adalah agar pasukan TNI ditarik dari Makassar, agar Negara Indonesia Timur dipertahankan dan agar KNIL diberi wewenang atas keamanan di Negara Indonesia Timur.



Coba sekarang Analisis Ini yaaa...

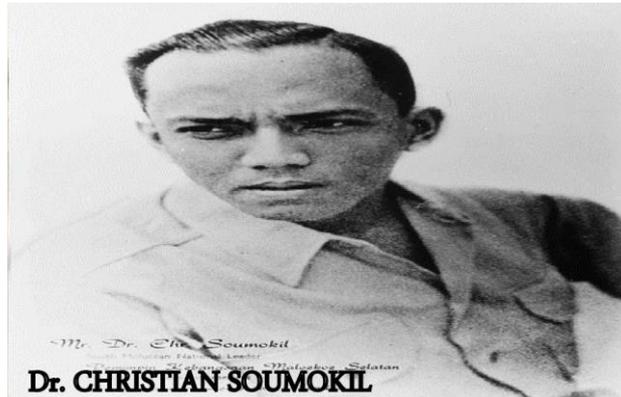
Bandingkan Pemberontakan yg dilakukan Andi Aziz dengan RMS ?



E. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Latar belakang pemberontakan RMS

Kekecewaan para bekas prajurit KNIL, Tidak setuju atas pembubaran NIT (Negara Indonesia Timur) dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan, Keinginan beberapa tokoh seperti Soumokil yang ingin mendirikan negara sendiri



Gambar : Dr. Christ Soumokil Pimpinan RMS

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) terjadi pada 25 April 1959, dipimpin oleh Chris Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berpusat di kota Ambon, dan pulau sekitarnya seperti pulau Seram.

Salah satu penyebab meletusnya pemberontakan RMS adalah banyak bekas prajurit KNIL (Tentara Kolonial Hindia Belanda) asal Maluku yang kecewa karena pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Mereka juga menolak bergabung dengan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).

Hal ini ditambah dengan kekecewaan Chris Soumokil, akibat bubarnya Negara Indonesia Timur (NIT). Soumokil dan para bekas prajurit KNIL ini membuat mereka menekan Kepala Daerah Maluku Selatan, Johannes Manuhutu, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, Manuhutu dibawah tekanan Chris Soumokil dan prajurit KNIL mendeklarasikan Republik Maluku Selatan.

Pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan mengirim pasukan APRIS dibawah pimpinan Slamet Riyadi dan Alex Kawilarang. Pada tahun 1950, Ambon dan Namlea berhasil direbut. Pada tahun 1963, Chris Soumokil berhasil di tangkap. RMS berhasil digagalkan dan para pendukungnya yang tersisa melarikan diri ke Belanda.

Hmmm...
Coba Analisis yaa..Penyebab Dr Soumokil mendirikan gerakan RMS ?
Hhe....
Jawab disini boleh..:



F. PRRI/Permesta di Sumatra dan Sulawesi

Latar Belakang Pemberontakan PRRI

Sejarah pemberontakan PRRI - Kemudian para tokoh militer dan sipil pada tanggal 9 Januari 1958 mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Sumatra Barat. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah pembentukan pemerintahan baru dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah baru tersebut.

Pada tanggal 15 Pebruari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara. Untuk menghadaai pemberontakan PRRI, pemerintah Indonesia melakukan Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Tujuan operasi ini adalah untuk menghancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah campur tangan asing.

Pemberontakan Permesta

- Sejarah pemberontakan Permesta - Sementara itu, setelah dibentuk Dewan Manguni, para tokoh militer Sulawesi memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Proklamasi di Sulawesi dipelopori oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual, Panglima Wirabhuana. Permesata kemudian bergabung dengan PRRI.
- Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi militer gabungan yang bernama Operasi Merdeka dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi menumpas Permesta ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat terbukti dengan ditembaknya Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (AUREV) yang dikemudikan oleh seorang warga negara Amerika Serikat.
- Pesawat itu ditembak pada tanggal 18 Mei 1958 di atas kota Ambon. Pada bulan Agustus 1958, pemberontakan Permesta baru dapat ditumpas.

Kemudian pada tahun 1961, pemerintah membuka kesempatan kepada sisa-sisa pendukung Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia.



Gambar : Pasukan Permesta saat sedang melakukan patroli di desa-desa

Eiiiiitsss....sebelum lanjut.. perhatikan ini..hheee



Analisislah dampak Pemberontakan Permesta untuk rakyat sumatra ...?

G. Pemberontakan Gerakan 30 September PKI 1965 (G-30-S/PKI)

1. Latar Belakang Pemberontakan PKI

Berdasarkan kronologi G30S PKI, sudah sejak lama PKI memprovokasi dan menghasut rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan penuh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Hasutan tersebut juga dilakukan dalam bentuk kecaman kepada kabinet dan tentara. Begitu juga dengan aksinya menciptakan istilah NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang membuat DN. Aidit dinyatakan sebagai dalang atau otak dari G30S PKI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto oleh Pemerintah RI. Kronologi G30S PKI sudah terjadi jauh sebelum hari naas itu tiba.

Pada bulan Agustus 1960 pemerintah membubarkan Masyumi dan PSI yang menjadi pesaing PKI sehingga membuat PKI semakin giat melakukan

mobilisasi massa untuk menyebarkan pengaruh dan merekrut lebih banyak anggota. Hal itu dimungkinkan karena beberapa partai lain seperti NU dan sejarah PNI Partai Nasional Indonesia juga tidak berdaya. Pada tahun 1963 dalam kronologi G30S PKI mulai berusaha untuk duduk di dalam kabinet, berbeda dari tahun - tahun sebelumnya yang hanya mengkritik pemerintah khususnya para menteri yang berbeda pandangan politik.



Gambar: Persiapan penumpasan gerakan PKI di Madiun

Hubungan antara PKI dan TNI AD juga semakin memanas dan tegang karena berbagai sindiran serta kritik PKI terhadap para petinggi TNI. PKI juga menyerang para pejabat yang anti PKI dengan tuduhan Kapitalis Birokrat Korup, mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima selain AD, AL, AU, dan Polisi. PKI mengusulkan Angkatan Kelima itu terdiri dari petani dan buruh yang dipersenjatai.

Dalam kronologi G30S PKI, kemudian berhembus isu tentang Dewan Jenderal Angkatan Darat yang sedang menyiapkan kudeta melawan pemerintahan yang sah. Bukti dari rencana itu menurut PKI adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Dubes Inggris Andrew Gilchrist di Indonesia, yang isinya bisa ditafsirkan sebagai adanya operasi dari pihak Inggris. Subandrio membawa informasi ini dari Mesir pada tanggal 15 Mei 1965 dengan bukti dokumen Gilchrist.

Soekarno menganggap isu ini sangat serius dengan memanggil para Menteri Panglima AD untuk meminta kejelasan mengenai Dewan Jenderal pada tanggal 25 Mei 1965. Keberadaan Dewan Jenderal ini kemudian ditolak dengan tegas oleh Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri Panglima AD ketika dikonfrontasi oleh Soekarno. Ia menyatakan bahwa Dewan Jenderal tidak ada, yang ada yaitu Dewan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang bertugas memberi

masuk atau pendapat kepada Menpangad mengenai kepangkatan dan jabatan perwira tinggi AD. Jendral Nasution juga memastikan bahwa isu tersebut tidak benar.

Perselisihan antara Angkatan Darat dan PKI mencapai puncaknya pada kronologi G30S PKI ketika Pelda Soejono yang hendak menghentikan penyerobotan tanah perkebunan dibunuh sekelompok orang dari BPI. Peristiwa itu dikenal sebagai Peristiwa Bandar Betsy Surabaya. Jenderal Ahmad Yani menuntut agar mereka yang terlibat diadili, sementara di Mangpingan tanah wakaf Pondok Modern Gontor seluas 160 hektar berusaha diambil alih paksa oleh PKI yang membuat kalangan Islam semakin marah.

Konflik antara AD dan PKI kemudian semakin memanas terlebih dengan sakitnya Soekarno secara mendadak pada bulan Juli sebelum Latar Belakang G30S PKI. DN. Aidit mendatangkan tim dokter dari Cina yang menyimpulkan bahwa ada kemungkinan Presiden akan mengalami kelumpuhan atau meninggal dunia. Situasi ini membuat pimpinan PKI memutuskan untuk bergerak pada rapat politik biro PKI tertanggal 28 September 1965. Pergerakan itu dipimpin oleh Letkol Untung, perwira AD yang dekat dengan PKI dengan menggunakan Pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal Presiden Soekarno. Pasukan ini diberi perintah untuk menangkap para Jenderal dalam keadaan hidup atau mati, dan mereka berhasil membunuh tujuh orang dalam penyerbuan tersebut yaitu:

- 1) Letjen Ahmad Yani (Kastaf Komando AD)
- 2) Mayjen TNI Raden Suprpto (Deputi II Menteri)
- 3) Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri)
- 4) Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri)
- 5) Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri)
- 6) Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman)
- 7) Lettu CZI Pierre Andreas Tendean (ajudan Jendral Nasution).

Pemberontakan tersebut yang dikenal dengan sebutan peristiwa G 30 S/PKI juga memakan korban jiwa Bripka Karel Sasuit Tubun (pengawal di kediaman resmi Wakil PM II dr. J. Leimena) dan Ade Irma Suryani, putri dari Jendral Abdul Harris Nasution. Jendral Nasution menjadi satu - satunya jendral yang selamat karena melarikan diri. Jenazah para korban kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya di Jakarta. Hingga kini sejarah lubang buaya menjadi saksi bisu tempat pembuangan mayat para perwira TNI tersebut.



Gambar: Jendral yang gugur karena kebiadaban PKI

Setelah pembunuhan itu, PKI menguasai dua sarana komunikasi penting yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. PKI menyiarkan pengumuman mengenai kronologi G30S PKI melalui RRI yang ditujukan epada para perwira tinggi lainnya anggota "Dewan Jenderal" yang akan mengkuodeta pemerintah, sekaligus mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang diketuai Letkol Untung Sutopo. PKI juga melakukan pembunuhan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta terhadap Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta) dan Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kastaf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta). Mereka dibunuh setelah diculik PKI pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965 karena menolak bergabung dengan Dewan Revolusi PKI. Ketahui juga mengenai biografi Ahmad Yani dan biografi Soeharto.

2. Pasca G30S PKI

Pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965 yang sekarang dikenal sebagai sejarah hari Kesaktian Pancasila dimulai operasi penumpasan G30S PKI dengan merebut kembali Gedung RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi. Operasi dilakukan oleh kesatuan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi dibantu pasukan kavaleri. Basis PKI yang diketahui berada di daerah Halim Perdanakusuma diserang pada 2 Oktober 1965 atas perintah Mayjen Soeharto.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD dipimpin Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai Lubang Buaya dan menemukan lokasi pembuangan

mayat para korban dalam kronologi peristiwa G30S PKI yaitu dalam sebuah sumur di daerah tersebut, bergaris tengah $\frac{3}{4}$ meter dan kedalaman sekitar 12 meter. Kemudian pada tanggal 4 Oktober pengalihan dilanjutkan oleh pasukan Para Amfibi KKO-AL disaksikan pimpinan sementara TNI AD Mayjen Soeharto. Kemudian jenazah para jenderal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan lebih dulu di Mabes TNI AD, dan mereka ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi pada tanggal 6 Oktober melalui surat keputusan pemerintah dalam Sidang Kabinet Dwikora.



Gambar disamping merupakan simbol PKI yang disilang karena merupakan organisasi terlarang dan menyesengsarakan rakyat Indonesia.. naah..sekarang analisislah kenapa PKI begitu ingin sekali menguasai pemerintahan...? 😊



Jawaaab sini yaa:...

H. Peran Tokoh Nasional dan Daerah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia

1. Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Berperan banyak dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI. Berikut penjelasannya

- a. Menjadi gubernur DI Yogyakarta
- b. Menjabat menteri dalam negeri (1945-49)

- c. Menjadi donatur perjuangan kemerdekaan
- d. Menjadi salah satu delegasi diplomatik Indonesia, termasuk di KMB
- e. Menolak bekerjasama dengan Belanda selama agresi militer I
- f. ikut berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949
- g. Menampung para tentara RI saat serangan umum 1 Maret di kediamannya.
- h. Menjabat menteri pertahanan (1949-51), menteri koordinator pembangunan dan pariwisata (1966) dan menteri perekonomian dan industri (1966-73)
- i. Menjabat sebagai wakil presiden (1973-78)
- j. Menjadi perintis pergerakan pramuka nasional.



Gambar : Sri Sultan Hamengkubuwono IX

2. H.M Soeharto

Soeharto merupakan satu-satunya presiden di Indonesia yang masa jabatannya paling lama yaitu kurang lebih 32 tahun. Kisah hidup beliau dipaparkan dalam salah satu buku biografi Soeharto, yang berjudul: Biografi daripada Soeharto, ditulis oleh A. Yogaswara, 2007. Dengan sebutan "Bapak Pembangunan", sosok Soeharto sukses membawa Indonesia menjadi negara Swasembada dimana sektor dibidang pertanian amat berkembang dengan pesatnya melalui Program Rapelitanya.

Masa pemerintahan presiden Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru dimana kebijakan politik baik dalam dan luar negeri diubah oleh Presiden Soeharto. Salah satunya adalah kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada masa Soekarno, Indonesia keluar sebagai anggota PBB. Selain itu banyak juga yang beranggapan kebijakan Presiden Soeharto pada zaman orde baru tersebut tidak ramah dengan kemanusiaan. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM juga banyak terjadi pada masa Orde Baru. Banyak yang melihat Soeharto sebagai figur pemimpin yang represif dan diktator. Tidak ada kebebasan sipil kala itu karena semua dikontrol oleh satu orang.

Titik kejatuhan Soeharto, ketika pada tahun 1998 dimana masa tersebut merupakan masa kelam bagi Presiden Soeharto dan masuknya masa reformasi bagi Indonesia,

Akan tetapi terlepas dari sejumlah pihak yang masih memperlakukan sejumlah kasus hukum Soeharto, fakta di dalam sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Soeharto memiliki jasa besar kepada Indonesia. Perjuangan Soeharto muda untuk Indonesia yang tercatat dalam buku sejarah bangsa ini, antara lain, pada masa revolusi fisik antara 1945 hingga 1949, pasca revolusi fisik antara 1962 hingga 1967 dan masa kepemimpinannya sebagai presiden

Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto memiliki karier cemerlang dalam kemiliteran. Di bidang kemiliteran, sosok Soeharto muda telah memimpin berbagai pertempuran dengan penuh keberanian. Pengorbanan, kegigihan dan pengabdianya kepada negara dan bangsa, menjadikannya salah satu putra terbaik bangsa yang layak mendapat anugerah kehormatan Jenderal Besar TNI dan Bintang Sakti

Pembawaannya tenang, tutur katanya terukur dan selalu bertindak sesuai aturan, Soeharto dijuluki *The Smiling General* (jenderal yang murah senyum). Dia sosok pria Jawa yang kalem dan berpenampilan sederhana. Namun di balik itu semua, Soeharto muda berhasil mengemban dengan baik berbagai pertempuran sengit dan tanggung jawab militer yang berat dan keras.

Sebelum kependudukan Jepang, Soeharto muda adalah anggota KNIL (Koninkijk Nederland Indische Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda dengan pangkat sersan. Pada era 1900-1942, menjadi serdadu KNIL Belanda bukanlah hal aneh bagi kaum pribumi. Bukan karena ideologi atau setia pada Belanda, tapi lebih sekadar cari makan. Umumnya pemuda-pemuda di daerah yang tandus dan tak punya pekerjaan mau jadi tentara karena tertarik upahnya. Kemudian Pada masa kependudukan Jepang, Soeharto bergabung dalam pasukan PETA (Pembela Tanah Air) dan berpangkat sebagai perwira (setara dengan Letnan Kolonel). Setelah bulan Agustus 1945, Soeharto bergabung di TKR (Tentara Keamanan Rakyat). TKR merupakan pelopor dari berdirinya TNI (Tentara Nasional Indonesia).



Gambar :H.M Soeharto muda sedang berfoto dengan anaknya Siti Hardijanti Rukmana dan Ibu Tien Soeharto

3. Gatot Subroto

Jenderal Gatot Subroto lahir di Banyumas 10 Oktober 1909. Ia dikenal sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Sejak anak-anak sudah menunjukkan watak seorang pemimpin. Dia memiliki keberanian, ketegasan, tanggung jawab, dan berpantang akan kesewenangan. Pengalaman tidak manis pernah dialaminya ketika masih bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS). Karena berkelahi dengan seorang anak Belanda, dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut.

Kasus itu sudah cukup menunjukkan bahwa sejak kecil dirinya sudah memiliki sifat pemberani dan tegas. Di kala orang tidak ada yang berani menantang anak-anak Belanda yang merasa lebih tinggi derajatnya dari kaum pribumi, Gatot Subroto dengan tanpa gentar sedikitpun maju menantang. Dikeluarkan dari sekolah ELS dia kemudian masuk ke sekolah Holands Inlandse School (HIS). Dari sana, dia akhirnya menyelesaikan pendidikannya formalnya. Namun setamat HIS, dia memilih tidak meneruskan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi, tetapi bekerja sebagai pegawai. Pilihannya menjadi pegawai tersebut ternyata juga tidak memuaskan jiwanya. Dia kemudian keluar dari pekerjaannya dan masuk sekolah militer di Magelang pada tahun 1923. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Gatot pun menjadi anggota KNIL (Tentara Hindia Belanda) hingga akhir pendudukan Belanda di Indonesia.

Tentara yang aktif dalam tiga zaman ini pernah menjadi Tentara Hindia Belanda (KNIL) pada masa pendudukan Belanda, anggota Pembela Tanah Air (Peta) pada masa pendudukan Jepang dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah kemerdekaan Indonesia serta turut menumpas PKI pada tahun 1948. Ia juga menjadi penggagas terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Berpendirian tegas dan memiliki solidaritas yang tinggi, merupakan ciri khas dari Jenderal Gatot Subroto. Pria lulusan Sekolah Militer Magelang masa pemerintahan Belanda, ini paling tidak bisa mentolerir setiap tindak kezaliman, walau oleh siapapun dan kapanpun.

Ketika Perang Dunia ke II bergolak, pasukan Belanda berhasil ditaklukkan pasukan Jepang. Indonesia yang sebelumnya merupakan daerah pendudukan Belanda beralih jadi kekuasaan pemerintah Kerajaan Jepang. Pada masa Pendudukan Jepang ini, Gatot pun langsung mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor yakni pendidikan dalam rangka perekrutan tentara pribumi oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. Tamat dari pendidikan Peta, dia diangkat pemerintah Jepang menjadi komandan kompi di Sumpyuh, Banyumas dan tidak berapa lama kemudian dinaikkan menjadi komandan batalyon.

Kesertaan Gatot Subroto menjadi anggota KNIL maupun Peta tidaklah mengindikasikan dirinya seorang kaki tangan pihak kolonial atau jiwa kebangsaannya yang rendah. Tapi hal itu hanyalah sebatas pekerjaan yang sudah lumrah zaman itu. Jiwa kebangsaan Gatot Subroto tetap tinggi. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai tentara pendudukan, perlakuannya sering terlihat memihak kepada rakyat kecil.



Gambar : Jenderal Gatot Subroto

Perlakuan itu bahkan sering diketahui atasannya sehingga dia sering mendapat teguran. Bahkan karena begitu tebalnya perhatian dan solider terhadap kaumnya, sering sebagian dari gajinya disumbangkan untuk membantu keluarga orang hukuman yang ada di bawah pengawasannya. Begitu juga halnya pada masa pendudukan Jepang, dia sering menentang orang Jepang yang bertindak kasar terhadap anak buahnya. Terhadap bawahannya, Gatot juga terkenal sebagai seorang pimpinan yang sangat perhatian. Namun walaupun begitu, sebagai militer, tanpa pandang bulu dia juga sangat tegas terhadap anak buahnya yang melanggar disiplin.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Gatot langsung masuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR), tentara bentukan pemerintah Indonesia sendiri dan merupakan tentara resmi RI yang dalam perjalanannya kemudian berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejak kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan kemerdekaan RI atau pada masa Perang Kemerdekaan yakni antara

tahun 1945-1950, dia dipercayai memegang beberapa jabatan penting. Pernah dipercaya menjadi Panglima Divisi II, Panglima Corps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya.

Bersamaan di saat dirinya menjabat Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun pun bergolak yakni pada bulan September 1948. Pemberontakan yang didalangi oleh Muso itu akhirnya berhasil diatasi dengan gemilang.

Setelah banyak terjadi peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda, pengakuan kedaulatan republik ini pun berhasil diperoleh. Pasca pengakuan kedaulatan itu, Gatot Subroto semakin dipercaya mengemban tugas yang lebih tinggi. Dia diangkat menjadi Panglima Tentara & Teritorium (T & T) IV I Diponegoro. Namun karena sesuatu hal pada tahun 1953, dia sempat mengundurkan diri dari dinas militer. Namun tiga tahun kemudian dia diaktifkan kembali sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad). Di kalangan militer, dia dikenal sebagai seorang pimpinan yang mempunyai perhatian besar terhadap pembinaan perwira muda. Menurutnya, salah satu cara untuk membina perwira muda adalah dengan menyatukan akademi militer setiap angkatan yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara, menjadi satu akademi. Gagasan tersebut akhirnya terwujud dengan terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).

Gatot Subroto akhirnya meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1962, pada usia 55 tahun. Sang Jenderal ini dimakamkan di desa Sidomulyo, kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang dikuatkan dengan SK Presiden RI No.222 Tahun 1962, tgl 18 Juni 1962.

Sekarang saatnya Latihan Soal-soal..Cuma dikit kok..



1. Dalam menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pasukan-pasukan TNI mengalami kesulitan, analisislah penyebabnya ?
2. Negara federal yang ingin dipertahankan oleh Andi Azis dalam pemberontakannya adalah pasundan, kenapa ? jelaskanlah
3. Prinsip Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI sebabnya karena?
4. Analisislah dampak sosial politik G 30 S/PKI bagi Indonesia ?
5. Untuk menumpas PRRI, pemerintah dan KSAD memutuskan untuk melancarkan operasi militer, bagaimanakah gerak operasi tersebut?

Pembelajaran

Bab II

Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

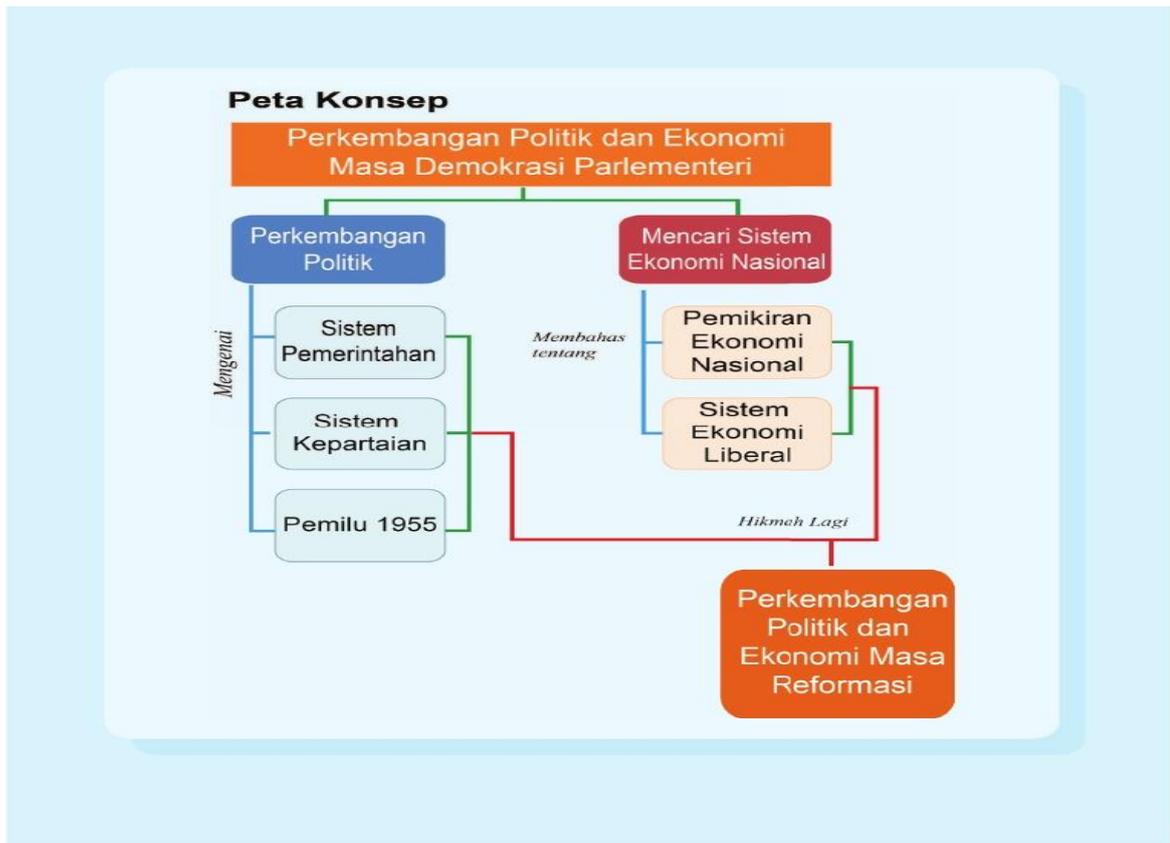
KI

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KD

- 3.3.1 Menjelaskan tentang latar belakang lahirnya demokrasi parlementer/liberal
- 3.3.2 Menjelaskan tentang cabinet Natsir
- 3.3.3 Menjelaskan tentang cabinet Sukiman
- 3.3.4 Menjelaskan tentang cabinet Wilopo
- 3.3.5 Menjelaskan tentang cabinet Ali Sastroamidjojo I
- 3.3.6 Menjelaskan tentang cabinet Burhanudin Harahap
- 3.3.7 Menjelaskan tentang cabinet Ali Sastroamidjojo II
- 3.3.8. Menjelaskan tentang cabinet Djuanda

Simak Peta Konsep ini gaees..



Pembelajaran 2

Pada Masa Demokrasi Liberal, banyak partai politik ikut serta dalam perebutan Parlemen Indonesia. Hal ini yang menjadi faktor keributan politik pada era ini.

Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang dirasakan sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia. Pada saat itu baik sebelum atau sesudah kemerdekaan, terdapat usul mengenai sistem negara yang dipergunakan, antara lain: Federasi, Monarki, Republik-Parlementer, dan Republik-Presidensial.

Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X bulan Oktober 1945, yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR/DPR melakukan tugas legislatif. Dengan demikian KNIP dari lembaga pembantu presiden menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga kepresidenan.

Kemudian KNIP yang dipimpin Sutan Sjahrir berhasil mendorong Pemerintah yaitu, Wakil Presiden Hatta untuk mengeluarkan Maklumat Pemerintah 13 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang pemberlakuan Kabinet Parlementer. Dengan maklumat tersebut Indonesia menjalankan sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahan. Presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sedangkan urusan pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri. Sjahrir terpilih menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama.

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer-liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950an terbagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang juga bernafaskan liberal.

APA ITU DEMOKRASI LIBERAL?

Demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Liberal disini dalam artian perwakilan atau representatif. Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik.

Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataanya bahwa UUDS 1950 dengan sisten Demokrasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

A. Pelaksanaan Pemerintahan

Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen). Dalam waktu lima tahun (1950 - 1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut:

1) Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)



Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh - tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

- a) Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
- b) Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
- c) Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
- d) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
- e) Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian mendapatkan kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan seperti: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Kabinet Natsir memiliki keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Dalam bidang ekonomi kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi "Gerakan Benteng" yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

- a) Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
- b) Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- c) Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
- d) Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.

Akan tetapi Tujuan program ini sendiri tidak dapat tercapai dengan baik meskipun anggaran yang digelontorkan pemerintah cukup besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

- a) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
- b) Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
- c) Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
- d) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
- e) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
- f) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Kabinet Natsir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh

kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)



Gambar : Sukiman Wirjosandjojo, Sosok Pencetus THR Pertama di Indonesia sekaligus pm Kabinet ini

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojokusastro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.

Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:

- a) Menjamin keamanan dan ketentraman
- b) Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
- c) Mempercepat persiapan pemilihan umum.
- d) Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
- e) Menyiapkan undang - undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. RMS. dan lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerja sama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat.

Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah

Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.



Wilopo

Lahir : Purworejo, 21 Oktober 1908
Jabatan : Pemimpin Kabinet Wilopo
Masa jabatan : 03 April 1952 - 29 April 1952

Karir politik :

1. Menteri Muda Perburuhan (1947-1948)
2. Menteri Perburuhan pada Kabinet RIS (1949-1950)
3. Menteri Perdagangan dan Perindustrian (1951-1952)
4. Menteri Luar Negeri & Perdana Menteri (1952)
5. Ketua Konstituante & Ketua DPA Indonesia (1968-1978)
6. Anggota Komite IV Tim Pemberantas Korupsi (1970)

Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

a. Program dalam negeri:

- 1) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD
- 2) Meningkatkan kemakmuran rakyat,
- 3) Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
- 4) Pemulihan stabilitas keamanan negara

b. Program luar negeri:

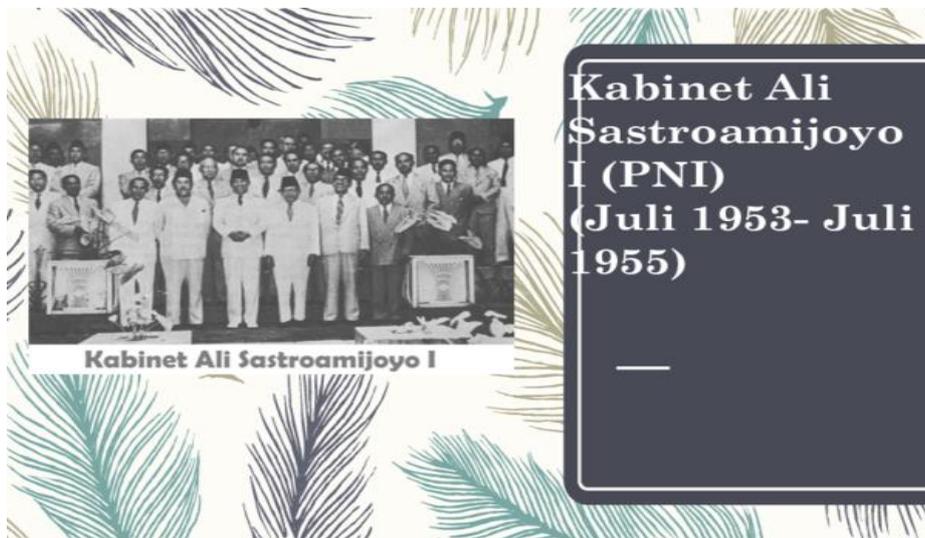
- 1) Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
- 2) Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta
- 3) Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan sparatis yang progresif. Ketimpangan Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional.

Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan

Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)



Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet ke-empat yang dibentuk selama Masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo dan Wakil PM. Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I:

- a. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
- b. Menyelenggarakan Pemilu dengan segera
- c. Pembebasan Irian Barat secepatnya
- d. Pelaksanaan politik bebas-aktif
- e. Peninjauan kembali persetujuan KMB.
- f. Penyelesaian pertikaian politik.

Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu:

- a. Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955
- b. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955
- c. Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia- Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :
 - 1) Berkurangnya ketegangan dunia
 - 2) Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya.
 - 3) Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia-Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB

Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba.

Sistem ekonomi ini merupakan penggambaran ekonomi pribumi - China. Sistem Ali Baba digambarkan dalam dua tokoh, yaitu: Ali sebagai pengusaha pribumi dan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi yang diarahkan pada pengusaha China.

Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan kepada pengusaha Indonesia. Sistem ekonomi ini kemudian didukung dengan :

- a. Pemerintah yang menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional
- b. Pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing

- c. Pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

Kabinet Ali ini juga sama seperti kabinet terdahulu mengalami permasalahan mengatasi pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD memperburuk usaha peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi.

Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Keretakan partai pendukung mendorong Kabinet Ali Sastro I harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)



Gambar: Sumpah Jabatan PM Burhanudin Harahap

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi.

Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:

- Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
- Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
- Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
- Perjuangan pengembalian Irian Barat
- Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:

- Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.

- b. Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
- c. Menjalinkan hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
- d. Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi
- e. Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi.

Kabinet ini mengalami gangguan ketika kebijakan yang diambil berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kabinet ini sendiri mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno ketika anggota Parlemen yang baru kurang memberikan dukungan kepada kabinet.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957)



Gambar : Formasi Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamijoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet.

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:

- a. Perjuangan pengembalian Irian Barat
- b. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
- c. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
- d. Menyejahterakan perimbangan keuangan negara.
- e. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
- f. Pembatalan KMB
- g. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif

h. Melaksanakan keputusan KAA.

Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode *planning and investment*. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Pada masa kabinet ini muncul gelombang anti Cina di masyarakat, meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat, serta mengarah pada gerakan *sparatisme* dengan pembentukan dewan militer di Sumater dan Sulawesi.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

7. Kabinet Djuanda



Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Kabinet baru kemudian dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah *Zaket Kabinet* karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya.

Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai *Panca Karya* yaitu:

- a. Membentuk Dewan Nasional
- b. Normalisasi keadaan RI
- c. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
- d. Perjuangan pengembalian Irian Jaya
- e. Mempregiat/mempercepat proses Pembangunan

Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan dibentuknya Dewan Nasional ini sebagai langkah awal demokrasi terpimpin. Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah Musyawarah Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 14 September 1957.

Munas tersebut membahas beberapa hal, yaitu masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Munas selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan (munap) pada bulan November 1957.

Tanggal 30 November 1957, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Keadaan negara memburuk pasca percobaan pembunuhan tersebut, banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat yang kemudian berakibat pada pemberontakan PRRI/Permesta.

Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pasca Deklarasi Djuanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939)*. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

“Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia.”

Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan sering jatuh banggunya kabinet sehingga menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan

Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan

Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mengambil kebijakan untuk mengatasi kemelut politik. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut:

- a. Pembubaran Konstituante.
- b. Berlakunya kembali UUD 1945.
- c. Tidak berlakunya UUDS 1950.
- d. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensial dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

Anak smart harus bisa donk jawab soal di bawah ini.. hhe



1. Analisislah tujuan sistem ekonomi Gerakan Benteng ?
2. Jelaskan penyebab munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi landasan Konstitusional Republik Indonesia !
3. Sistem perekonomian Indonesia pada periode 1945 - 1952, adalah "Ekonomi Dualistik." Bandingkan antara "Ekonomi Dualistik" dengan ekonomi skrang ?
4. Menurut kalian, apa alasan Amerika Serikat memberi dukungan terhadap pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Sulawesi Utaea tahun 1958?, analisislah !
5. Hal-hal positif apa sajakah yang bisa dijadikan pelajaran dari masa demokrasi liberal untuk masa sekarang?

Bab III

Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

KI

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KD

- 3.4.1 Menganalisis tentang latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin
- 3.4.2 Menganalisis peta kekuatan politik nasional
- 3.4.3 Menganalisis pembebasan Irian Barat
- 3.4.4 Menganalisis konfrontasi terhadap Malaysia
- 3.4.5 Menganalisis perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin

Pembelajaran III

Peta Konsep



A. Dinamika Politik

Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui panitia perumus Dewan Nasional, dibahas mengenai usulan kembali ke UUD 1945.



Usulan ini berawal dari KSAD Mayor Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke UUD 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan UUD Sementara 1950. Situasi ini pada awalnya membuat Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan, namun atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 1945.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan

ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante, Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke UUD 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Dalam amanatnya Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat.

UUD 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Untuk itu, Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima UUD 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai UUD RI yang tetap. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden, namun setelah melakukan pemungutan sebanyak tiga kali tidak mencapai kuorum untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang tetap.

Pada keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Hal ini disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting, konflik politik antarpolisi semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang merupakan Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencegah munculnya ekses-ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A.H. Nasution, atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik, yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959, pukul 06.00 Pagi. KSAD dan Ketua Umum PNI, Suwiryo, menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945 dengan suatu Dekrit Presiden. Sekretaris Jenderal PKI pun, D.N. Aidit memerintahkan anggota partainya yang duduk di Dewan Konstituante untuk tidak menghadiri kembali sidang Dewan Konstituante.

Presiden Soekarno memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan bangsa Indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Ir. Djuanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional (Roeslan Abdoel Gani dan Moh. Yamin), serta ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk

melakukannya melalui Dekrit Presiden. Pada hari Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit yang memuat tiga hal pokok yaitu:

Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS).

Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Dekrit juga mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Mereka berharap dengan Dekrit akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekrit pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekrit juga didukung oleh TNI dan dua partai besar, PNI dan PKI serta Mahkamah Agung. Bahkan KSAD, salah satu konseptor Dekrit, mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden. Dukungan lain kemudian datang dari DPR, dalam sidangnya pada 22 Juli 1959, dipimpin langsung oleh ketua DPR, secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan UUD 1945.

Melalui Dekrit Presiden, Konsep Demokrasi Terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsepsi 1957 direalisasikan pemberlakuan melalui *Staatsnoodrecht*, hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah politik ini terpaksa diambil karena keadaan tatanegara dalam keadaan krisis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mengancam keutuhan NKRI.

Sehari sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Soekarno bertindak selaku perdana menteri, dan Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua orang wakil yaitu dr. Leimena dan dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri dari sembilan menteri dan 24 menteri muda. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar, sehingga kabinet bisa dikatakan sebagai kabinet non partai. Namun kabinet ini mengikutsertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian, dan jaksa agung sebagai menteri negara *ex officio*. Program kabinet yang dicanangkan meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat.

Pembentukan kabinet kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno, dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan

presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959, dengan komposisi berjumlah 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil/utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya/fungsional dan satu orang wakil ketua.

Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti imperialisme-kapitalisme, anti demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". DPA dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan nama "Manifesto Politik Republik Indonesia" disingkat Manipol.



Gambar: suasana sidang masa demokrasi terpimpin

Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Chairul Saleh (tokoh Murba) sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh presiden, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Mereka yang diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu setuju kembali ke UUD 1945, setia kepada perjuangan RI dan setuju dengan Manifesto Politik. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, namun diatur melalui Penpres No. 2 Tahun 1959, di mana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Sementara itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan UUD 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959. Pada awalnya tampak anggota DPR lama seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno, hal ini terlihat ketika DPR secara aklamasi dalam sidang 22 Juli 1959 menyetujui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Akan tetapi benih konflik sebenarnya sudah mulai muncul antara ketua DPR dan Presiden.

Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono meyakinkan presiden bahwa mandat itu pasti akan diberikan, namun Presiden Soekarno menolak, ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR.

Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan oleh Pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR). Para anggota DPRGR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan pertimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan pertimbangan lima golongan, yaitu Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik, dan golongan fungsional.

Sehingga dalam DPRGR terdiri atas dua kelompok besar yaitu wakil-wakil partai dan golongan fungsional (karya) dengan perbandingan 130 wakil partai dan 153 wakil golongan fungsional. Pelantikan anggota DPRGR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPRGR adalah Pembantu Presiden/Mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS.

Pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pimpinan NU dan PNI. Tokoh NU yang pada awalnya keberatan atas pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 dan mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPRGR. Akan tetapi sikap ini berubah setelah jatah kursi NU dalam DPRGR ditambah. Namun, K.H. Wahab Chasbullah, Rais Aam NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerja sama dengan PKI.

Tokoh dari kalangan PNI yang menolak kebijakan Presiden Soekarno datang dari dua orang sahabat Soekarno, Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Tjokroadisurjo. Sartono merasa prihatin terhadap perkembangan yang ada dan Iskaq menyatakan bahwa anggota PNI yang duduk dalam DPRGR bukanlah wakil PNI. Hubungan mereka dengan PNI sudah tidak ada lagi, sebab mereka yang duduk dalam DPRGR adalah hasil penunjukan. Sikap tokoh partai memang bervariasi, mereka yang menolak pembubaran DPRGR menggabungkan diri dalam suatu kelompok yang menamakan dirinya Liga Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi ini meliputi tokoh partai NU, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, IPKI dan PSII, dan beberapa panglima daerah yang memberikan dukungan. Kelompok ini mengusulkan untuk penangguhan pembentukan DPRGR. Namun Liga Demokrasi ini kemudian dibubarkan oleh Soekarno.

Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno.

Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan Ketetapan Presiden No. 94 Tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif. MPRS, DPRGR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Pengintegrasian lembaga-lembaga tersebut dengan eksekutif membuat pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah pada lembaganya masing-masing.

Selain itu Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1962. MPPR merupakan badan pembantu Pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPRGR, departemen-departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom.

Penilai terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari M. Hatta, melalui tulisannya dalam Majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul "Demokrasi Kita". Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR sampai pada pengamatan adanya 'krisis demokrasi', yaitu sebagai

demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator.

Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI, yang sejak kabinet Djuanda diberlakukan S.O.B. kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD, membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama angkatan udara.

Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Dengan menerima Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD.

PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi "menempel" pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Hal ini seperti apa yang diungkapkan D.N. Aidit bahwa melaksanakan Manipol secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum Manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot manipol. Apa yang diungkapkan Aidit ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno.

PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-sebaiknya, karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata "sedang" di depan kata "memberontak", sehingga rumusnya berbunyi "sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam

pemberontakan....". Sesuai dengan rumusan itu maka partai yang calon kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah pemberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. (Anhar Gonggong, 2005)



Gambar: partai politik yang ada pada demokrasi terpimpin

PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI, Aidit, Siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila. Berbagai pidato Soekarno dikutip disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling Manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia.

Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet Gotong Royong (Nasakom) pada tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA, dan Pengurus Besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR). Kondisi ini mendorong pimpinan TNI AD berusaha untuk mengimbangnya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI.

Ketika TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan UU Keadaan Bahaya mengambil tindakan terhadap PKI dengan melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan, namun mereka berhasil lolos. Kegiatan-kegiatan PKI-PKI di daerah juga dibekukan. Namun tindakan TNI AD ini tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala

keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Peperda mengambil tindakan politis terhadap PKI.

Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang Resume Program Kegiatan PKI Dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun pimpinan PKI, Aidit, menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Namun hal ini diselesaikan Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur di dalam negeri diselesaikan secara musyawarah karena sedang menjalankan proyek Nekolim, konfrontasi dengan Malaysia.

Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Namun PKI melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sikap ofensif dengan melakukan serangan politik terhadap Partai Murba dengan tuduhan telah memecah belah persatuan Nasakom, dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Upaya-upaya PKI ini membawa hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Murba, di antaranya Soekarni dan partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno.

Merasa kedudukannya yang semakin kuat PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI mulai dari aksi corat-coret, pidato-pidato dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut penggantian pembantu-pembantu Presiden yang tidak mampu merealisasikan Tri Program Pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuk Kabinet Gotong-Royong yang berporoskan Nasakom.

Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD. Seperti peristiwa Bandar Betsy (Sumatera Utara), Peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota.

B. Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya herordering ekonomi. Di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi

berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional.

1. Ekonomi dan Keuangan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.

Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategy, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.

Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.

Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.

Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.

Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1.000 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100.

Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960.



Gambar: kantor Pusat Bakamla RI yang dulunya kantor Depernas

Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir. Djuanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan Konsep Djuanda. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia.

2. Upaya Perbaikan Ekonomi

Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon)

sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

Strategi Ekonomi Terpimpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap; Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.

Peraturan pelaksanaan Dekon tidak terlepas dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap Dekon. PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan Dekon, padahal Aidit terlibat di dalam penyusunannya, selama yang melaksanakannya bukan orang PKI. Empat belas peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.

3. Memburuknya Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis dari pada ekonomi, misalnya pembangunan Monumen Nasional (Monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV dan Games of the New Emerging Forces (Ganefo).

Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit (kredit impor) jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah satu atau dua tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara Rp250 juta sampai Rp 1 milyar. Perusahaan atau perseorangan itu harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat

prestise politik atau mercusuar, dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri.

Dampak dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 (uang lama) diganti dengan Rp1 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).



DEMOKRASI TERPIMPIN



1. Pelaksanaan pemilu tahun 1955 berlangsung dalam dua tahap, **analisislah** keuntungan kerugian untuk Indonesia dari pelaksanaan pemilu tersebut..
2. **Analisislah** dampak terbentuknya zaken kabinet untuk perekonomian waktu itu...
3. Kabinet Juanda memiliki lima program kerja yang disebut pancakarya, bandingkan dengan program kerja kabinet sebelumnya?
4. Pembentukan Kotoe dan Kesop pada masa demokrasi terpimpin bertujuan untuk
5. Masalah Irian Barat akhirnya dapat diselesaikan melalui Persetujuan New York, **analisislah** dampak untuk kedaulatan Indonesia..

Pembelajaran

Bab IV

Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru

KI

5. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
6. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KD

- 3.5.1 Menjelaskan tentang aksi-aksi Tritura
- 3.5.2 Menjelaskan tentang Surat Perintah Sebelas Maret
- 3.5.3 Menjelaskan tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional
- 3.5.4 Menjelaskan stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan
- 3.5.5 Menjelaskan stabilisasi penyeragaman
- 3.5.6 Menjelaskan Dwifungsi ABRI
- 3.5.7 Menjelaskan Rehabilitasi Ekonomi ORBA
- 3.5.8 Menjelaskan Kebijakan Pembangunan ORBA

Peta Konsep

**MASA ORDE
BARU**

Kamu pastinya sudah nggak asing dong ketika mendengar kata 'Orde Baru'? Ya, Orde Baru adalah masa sebelum Reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Sekedar informasi aja nih Squad, jadi yang memberi nama orde lama itu adalah pemerintahan orde baru, padahal Bung Karno tidak suka dengan sebutan itu, Ia lebih suka disebut orde revolusi. Nah, pada artikel ini kita akan mempelajari kehidupan politik dan ekonomi masa orde baru. Yuk simak biar pengetahuan kamu lebih banyak lagi.

A. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru



Lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G 30 S PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 Oktober 1965 para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII,

dan GMNI. Pimpinan KAMI berbentuk Presidium dengan ketua umum Zamroni (PMII). Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Cosmas Batubara, Subhan ZE, Hari Tjan Silalahi dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi

Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 S PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda, mahasiswa dan pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI), kemudian muncul pula KABI (buruh), KASI (sarjana), KAWI (wanita), KAGI (guru) dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G-30S/PKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila.

Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G 30 S PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka.



Gambar: Potret kekejaman PKI, pembantaian Ulama dan Santri di Madiun

Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia (Kogam) yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan.

Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila, dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri, selain itu mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina (RRC), Hsin Hua. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno.

Pada hari itu juga Presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha "membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan", dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden, serta memperhebat "pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek "British Malaysia".

Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seases dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu di antara Tritura telah dilaksanakan.

Selain itu Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Supersemar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G-30-S PKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikad tidak baik dalam penyelesaian masalah itu.

Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator ad interim yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid, dan Dr. J. Leimena. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan

tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya "dualisme kepemimpinan nasional", yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya "dualisme kepemimpinan nasional" ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan dijadikannya Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu Mandataris MPRS.



Gambar : Sidang MPRS 7 Maret 1967 mencabut mandat Presiden Soekarno

Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar "Pemimpin Besar Revolusi" tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul "Nawaksara". Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.

B. Perjalanan dan kebijakan masa Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis (Blok Timur). Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan (polkam). Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan (*security approach*), termasuk di dalamnya de-Soekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik (*orsospol*) yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti; Kopkamtib (pada 1 November 1965), Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional (11 Agustus 1966), dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1 Agustus 1970).

Sebagai wujud nyata dari niat itu, Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963-1966. Di samping itu, sejak 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pada era Orde Lama, Indonesia pada 1 Januari 1965, keluar dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina membentuk organisasi kerja sama regional ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) di Bangkok 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerja sama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya.

Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi:

Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (*Repelita*) dan Pemilihan Umum (*Pemilu*);

1. Menyusun dan merencanakan *Repelita*;

2. Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971;
3. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa *G 30/S/PKI* dan setiap bentuk rong-rongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
4. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.

Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No. IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Pemerintah Orde Baru melakukan 'pelemahan' atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan kelompok Islam Fundamentalis (yang sering disebut kaum ekstremis kanan). Selain itu, pemerintahan Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar.



Gambar: Fusi partai atau penyederhanaan Partai menjadi 3 partai

Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa "demokrasi parlementer". Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antarpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis, bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas polkam. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada awalnya banyak parpol yang menolak gagasan itu, yang sedikit banyak dinilai telah menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan

berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Namun adanya tekanan pemerintah menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan lain.

Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep "massa mengambang". Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Sementara itu jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar (monoloyalitas).

Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR di mana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah (pegawai negeri sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi, dan politik. Stabilitas Nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan, akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk terwujudnya "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan dari kebebasan masing-masing individu itu berupa pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkeadaban. Oleh karena itu, merupakan kebenaran universal di manapun jika bentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab, dalam aspek apapun tidak dapat ditoleransi.

Dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya, semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik jika ada stabilitas politik dan keamanan. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, di Jakarta. Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut.

Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu (1) takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan; (2) mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang; (3) mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi; (4) demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah; (5) suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain (Referensi Bahan Penataran P4 dalam Anhar Gonggong ed, 2005: 159).

Dwifungsi ABRI, diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan, namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968.

Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan Dwifungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditematkannya militer di DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), di mana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada panglima ABRI.

Selain itu, para ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah dari mulai Jakarta sampai ke daerah-daerah terpencil, salah satunya dengan gerakan AMD (ABRI Masuk Desa). Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat antipartai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri.

Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata terutama melalui Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Contohnya pada Munas I Golkar di Surabaya (4-9 September 1973), ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat I dan daerah tingkat II jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Selain itu, terpilihnya Sudharmono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin

Golkar (pada Munas III) juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer.

Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada Tap MPRS No. XXIII/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat.

Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya.

Untuk menanggulangi masalah hutang-piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis (Paris Club), untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang-piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikad baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dolar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Begitu pula dengan Inggris telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah RI semasa era konfrontasi pada tahun 1965.

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan, dari 650% menjadi 120% (1967), dan 80% (1968), sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama akan dimulai pada tahun berikutnya (1969). Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya inflasi terus menurun menjadi 25% (1969), 12% (1970), dan 10% (bahkan sampai 8,88%) pada tahun 1971.

C. Negara Masa Orde Baru

Pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Gambar: proyek mercusuar pembangunan orde baru

Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973-1978-1983-1988-1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Adapun Repelita yang berisi program-program kongkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Dalam Repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dengan konsep Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) menurut indikator saat itu pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1995-2020).

Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada tiga konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu:

1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
3. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan

suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara kongkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras). Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat.

Namun, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik.

Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/ DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.



Gambar: Demonstrasi masa orde baru menuntut mundurnya presiden

Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan/mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia.

Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, kesenjangan kota dan desa, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian.

Dengan situasi politik dan ekonomi seperti di atas, keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan Orde Baru yang berhasil meningkatkan GNP Indonesia ke tingkat US\$600 di awal tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai US\$1.300 per kapita di awal dekade 1990-an, serta menobatkan Presiden Soeharto sebagai "Bapak Pembangunan" menjadi seolah tidak bermakna. Sebab meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur dan Irian Barat/Papua. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997.



Naaah... sekarang curahkanlah isi hatimu ke dalam soal-soal ini..hhe



1. Analisislah dampak ekonomi transisi orde dari demokrasi terpimpin ke orde baru ?
2. Bandingkanlah kenapa pada tiap-tiap bentuk pemerintahan selalu membawa isu papua dalam proses perjuangannya !
3. Fusi partai merupakan penyederhanaan jumlah partai politik, apakah relevan dengan konsep berbangsa indonesia yang Bhinek Tunggal Ika, analisislah !
4. Jelaskan yang menjadi landasan pelaksanaan pemerintahan Orde Baru ?
5. Pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru banyak yang menyalahgunakan kesempatan dalam pemerintahan seperti KKN, analisislah yang menjadi celah terjadinya hal tersebut !

